

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi modern. Keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial, mempersempit akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan menjadi salah satu perhatian penting dalam agenda pembangunan global maupun regional.

Ketimpangan pendapatan pada dasarnya merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, struktural, dan kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesempatan kerja, pengangguran, struktur pasar tenaga kerja, perdagangan, kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, serta kualitas institusi merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi distribusi pendapatan dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor tersebut bekerja melalui mekanisme yang berbeda dalam menentukan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan mengakses sumber daya ekonomi. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu determinan, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kondisi yang membentuk distribusi kesempatan dan sumber daya dalam masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan seluruh determinan tersebut secara bersamaan. Pemilihan variabel penelitian dilakukan berdasarkan fokus penelitian, relevansi terhadap perubahan struktur perekonomian, serta hubungan teoritis dan empiris yang memungkinkan variabel-variabel tersebut

dianalisis secara bersama. Dalam penelitian ini, digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah dipilih karena keduanya merepresentasikan dua aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam menentukan distribusi manfaat ekonomi, yaitu aspek perubahan teknologi dan aspek kualitas pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak menganggap bahwa digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan ketimpangan pendapatan, melainkan memfokuskan analisis pada kedua faktor tersebut karena memiliki relevansi khusus dalam konteks transformasi ekonomi digital yang berlangsung di kawasan ASEAN.

Digitalisasi dipilih karena perkembangan teknologi telah menjadi bagian penting dari perubahan struktur perekonomian dan memengaruhi cara masyarakat memperoleh pekerjaan, menghasilkan pendapatan, mengakses pasar, serta memperoleh berbagai layanan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami transformasi ekonomi yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, mulai dari internet, telepon seluler, komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), hingga berbagai platform digital. Perkembangan tersebut telah mengubah aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan interaksi sosial masyarakat sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan mendorong terbentuknya berbagai model bisnis baru. Dengan perubahan tersebut, digitalisasi tidak lagi hanya menjadi perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari transformasi struktural perekonomian.

Transformasi digital mengalami akselerasi signifikan sejak pandemi COVID-19, menjadikannya katalisator adopsi teknologi secara masif. Kondisi ini telah mengubah digitalisasi yang semula dipandang sebagai pilihan strategis menjadi elemen sentral bagi ketahanan operasional dan keberlangsungan ekonomi (OECD, 2020; McKinsey, 2020). Pergeseran menuju ekonomi berbasis platform digital ini mencakup otomatisasi industri serta integrasi finansial yang secara fundamental mengubah lanskap produksi dan konsumsi global (UNCTAD, 2021). Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga berlangsung

secara intensif di kawasan berkembang, termasuk Asia Tenggara yang merupakan salah satu kawasan dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat.

Perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara menunjukkan besarnya perubahan struktural yang sedang berlangsung. Akselerasi digital di kawasan Asia Tenggara telah terbukti secara empiris dengan nilai ekonomi internet tumbuh dari US\$32 miliar pada tahun 2015 menjadi melampaui US\$300 miliar pada tahun 2025 (Google; Temasek; Bain & Company, 2025). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis digital telah berkembang secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ini juga ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, ekspansi perdagangan elektronik, berkembangnya layanan keuangan digital, serta meningkatnya adopsi teknologi oleh masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi ekonomi kawasan ASEAN melalui penurunan biaya transaksi, perluasan akses pasar, serta peningkatan efisiensi proses produksi dan distribusi.

Meskipun demikian, peningkatan efisiensi ekonomi akibat perkembangan teknologi digital tidak selalu berjalan searah dengan pemerataan pendapatan. Manfaat ekonomi dari inovasi teknologi dapat terdistribusi secara tidak merata apabila akses terhadap teknologi, keterampilan, modal, dan peluang ekonomi digital lebih banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. UNCTAD (2021) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan bioteknologi yang memiliki risiko meningkatkan ketimpangan dengan memperlebar kesenjangan digital antara pihak yang memiliki akses teknologi dengan yang tidak. Tanpa adanya mekanisme redistribusi yang efektif dan strategi kebijakan yang inklusif, transformasi digital justru berpotensi memicu polarisasi ekonomi, di mana keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok yang sudah memiliki modal dan keterampilan tinggi.

Mekanisme tersebut dapat dijelaskan melalui konsep kesenjangan digital (*digital divide*), yang tidak lagi hanya berkaitan dengan perbedaan kepemilikan perangkat atau akses terhadap internet, tetapi juga mencakup perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara produktif. UNCTAD (2021)

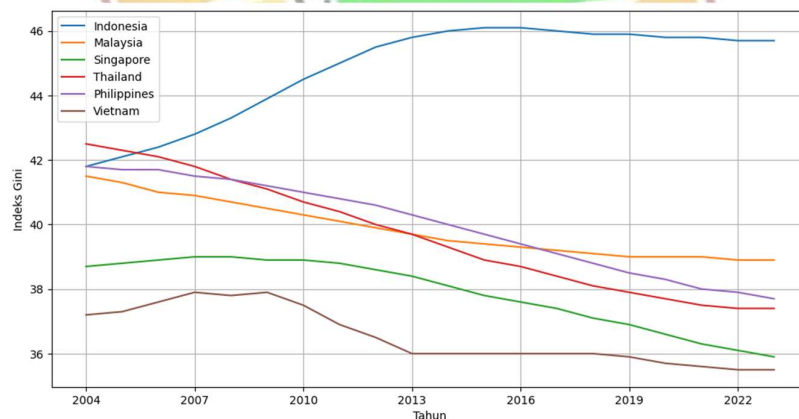
menjelaskan bahwa kesenjangan digital dapat menjadi bentuk ketimpangan baru yang memperkuat ketimpangan yang telah ada karena kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses dan kemampuan digital memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh manfaat ekonomi dari transformasi teknologi. Kondisi ini juga berkaitan dengan teori *Skill-Biased Technological Change* (SBTC), yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi cenderung meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan tinggi. Selain itu, Acemoglu dan Restrepo (2019) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi juga dapat menggantikan tenaga kerja melalui otomatisasi terhadap berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan manusia. Dengan demikian, digitalisasi dapat menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi pada saat yang sama dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kelompok masyarakat berdasarkan kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi.

Transformasi digital juga melahirkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru, seperti *gig economy* dan layanan *financial technology* (*fintech*). *Gig economy* dapat membuka peluang kerja dan sumber pendapatan baru, tetapi juga dapat meningkatkan ketidakpastian pendapatan karena sebagian pekerja tidak memperoleh perlindungan kerja yang sama dengan pekerja formal. Di kawasan ASEAN, data menunjukkan bahwa sekitar 78% angkatan kerja bekerja di sektor informal (ILO, 2018, dalam ASEAN Secretariat, 2019), sehingga perkembangan platform digital dapat memberikan peluang sekaligus tantangan bagi kelompok pekerja tersebut. Di sisi lain, perkembangan *fintech* dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi manfaatnya juga dipengaruhi oleh tingkat literasi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan pendapatan, tetapi dampaknya bergantung pada kondisi ekonomi dan kelembagaan yang menyertainya.

Kondisi paradoks ini terlihat nyata pada dinamika distribusi pendapatan di enam negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam (selanjutnya disebut sebagai ASEAN-6). Meskipun kawasan ini mengalami lonjakan adopsi

digital yang masif, tren ketimpangan pendapatan justru menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif tanpa dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata cenderung menghasilkan capaian statistik yang kurang mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara riil. Kondisi ini menjadi tantangan krusial bagi negara-negara tersebut, mengingat pesatnya arus digitalisasi berpotensi memperdalam polarisasi kesejahteraan apabila tidak disertai dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang mumpuni.

Untuk memotret ketimpangan pendapatan, penelitian ini menggunakan indeks Gini sebagai indikator utama ketimpangan. Mengikuti standar basis data *World Development Indicators* yang disusun oleh World Bank (2023), data indeks Gini dalam penelitian ini disajikan dalam skala 0–100. Penggunaan skala ini dilakukan dengan asumsi bahwa nilai yang lebih tinggi secara konsisten merepresentasikan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih besar, sekaligus memudahkan interpretasi komparatif mengenai pola distribusi pendapatan lintas negara di kawasan ASEAN-6.



Gambar 1. 1 Grafik Indeks Gini Enam Negara ASEAN

Sumber: SWIID, 2026

Berdasarkan visualisasi data pada Gambar 1.1, terlihat adanya divergensi pola yang signifikan pada dinamika distribusi pendapatan di kawasan ASEAN-6 selama dua dekade terakhir. Meskipun keenam negara secara serentak mengalami akselerasi adopsi digital yang masif, tren ketimpangan pendapatan tidak menunjukkan konvergensi, melainkan justru memperlihatkan anomali pada konteks

nasional tertentu. Indonesia merepresentasikan anomali dengan tren indeks Gini yang terus mengalami peningkatan, yang berbanding terbalik dengan kondisi di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang secara konsisten berhasil menurunkan tingkat ketimpangan pendapatannya. Perbedaan arah perkembangan ini mengindikasikan bahwa dampak digitalisasi terhadap distribusi pendapatan tidak bersifat seragam antar negara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang dapat menentukan bagaimana perkembangan digitalisasi diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang lebih merata.

Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam konteks tersebut adalah kualitas tata kelola pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kelembagaan yang menentukan bagaimana sumber daya dan peluang ekonomi didistribusikan serta bagaimana perkembangan teknologi diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kualitas regulasi, efektivitas pemerintah, penegakan hukum, stabilitas politik, pengendalian korupsi, serta akuntabilitas merupakan aspek kelembagaan yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola perubahan ekonomi dan memastikan tersedianya kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat.

Mengacu pada pemikiran North (1990) dalam teori institusi, pemerintah berfungsi sebagai penyedia *rules of the game* atau aturan main yang menentukan apakah suatu inovasi akan membawa kemakmuran bagi banyak orang atau justru memicu eksklusivitas. Kualitas pemerintah melalui penegakan hukum yang adil, stabilitas politik, dan regulasi yang transparan menjadi prasyarat agar digitalisasi dapat berjalan selaras dengan target pemerataan. Keberhasilan fungsi ini bergantung pada enam parameter *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dikembangkan oleh World Bank, yaitu *Government Effectiveness*, *Control of Corruption*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, *Political Stability*, dan *Voice and Accountability*, yang bekerja secara sinergis sebagai fondasi institusional yang menentukan apakah transformasi digital akan membawa pertumbuhan inklusif atau sebaliknya.

Pemilihan kualitas tata kelola pemerintah sebagai variabel penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa faktor kelembagaan tersebut memiliki fungsi

yang berbeda tetapi melengkapi faktor teknologi yang direpresentasikan oleh digitalisasi. Digitalisasi merepresentasikan perubahan dalam teknologi dan aktivitas ekonomi, sedangkan kualitas tata kelola pemerintah merepresentasikan kapasitas kelembagaan dalam mengatur dan mengarahkan perubahan tersebut. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintah tidak dipilih karena merupakan satu-satunya faktor kelembagaan yang memengaruhi ketimpangan, tetapi karena memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan manfaat transformasi digital tersebar secara lebih inklusif.

Lebih lanjut, hubungan antara digitalisasi dan kualitas tata kelola pemerintah menjadi penting karena dampak digitalisasi terhadap ketimpangan tidak hanya berpotensi berbeda antarindividu, tetapi juga antarnegara dengan kondisi kelembagaan yang berbeda. Digitalisasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi, pasar, layanan keuangan, dan berbagai peluang ekonomi sehingga berpotensi menurunkan ketimpangan. Namun, manfaat tersebut tidak selalu dapat dinikmati secara merata apabila pemerintah belum mampu menciptakan kebijakan, regulasi, dan pelayanan publik yang mendukung pemanfaatan teknologi secara inklusif. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintah berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh digitalisasi terhadap ketimpangan pendapatan.

Dalam konteks ASEAN, disparitas kualitas tata kelola pemerintah antaranggota kawasan masih sangat lebar. Berdasarkan Tabel 1.1, Singapura memimpin dengan indeks kualitas institusi yang sangat tinggi, yaitu dengan nilai indeks 2,15, sementara Indonesia bahkan mencatatkan angka negatif sebesar -0,17 pada tahun 2023. Perbedaan indeks kualitas tata kelola pemerintah inilah yang diduga menjadi faktor yang menyebabkan pola ketimpangan di setiap negara ASEAN berbeda meskipun semua mengalami digitalisasi yang pesat. Hal ini sejalan dengan temuan Adams & Akobeng (2021) yang menegaskan bahwa indikator tata kelola yang baik seperti kualitas regulasi, penegakan hukum, dan stabilitas politik memiliki peran krusial dalam memperkuat hubungan positif antara pemanfaatan TIK dan penurunan ketimpangan pendapatan.

Dengan kata lain, tata kelola yang berkualitas berfungsi sebagai prasyarat bagi digitalisasi untuk dapat bekerja secara efektif sebagai instrumen redistribusi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara empiris peran kualitas tata kelola pemerintahan dalam hubungan antara digitalisasi dan ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN-6.

Tabel 1. 1 Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintah

No	Negara	Tahun	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintah
1	Indonesia	2023	-0,17
2	Malaysia	2023	0,46
3	Singapura	2023	2,15
4	Thailand	2023	0,98
5	Filipina	2023	0,29
6	Vietnam	2023	0,30

Sumber: World Bank, 2023

Dalam penelitian ini, digitalisasi didefinisikan sebagai proses adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial, yang diukur melalui jumlah pengguna internet, penggunaan telepon seluler, dan pelanggan telepon kabel (Ho et al., 2025). Sementara itu, kualitas tata kelola pemerintahan merujuk pada kapasitas negara dalam menjalankan fungsi otoritas publik secara efektif, transparan, dan akuntabel, yang mencakup enam dimensi yaitu suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi (Kaufmann, 2011). Kedua variabel ini dipilih karena secara teoritis maupun empiris terbukti memiliki peran yang saling melengkapi dalam menentukan arah dampak digitalisasi terhadap distribusi kesejahteraan. Tata kelola yang baik berfungsi sebagai instrumen regulasi yang memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif, sebaliknya, tanpa kualitas institusi yang memadai, digitalisasi justru berisiko memperlebar kesenjangan pendapatan alih-alih menjadi solusi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Penelitian ini berangkat dari adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil studi terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi menurunkan ketimpangan melalui inklusi keuangan dan akses pasar yang lebih luas, sementara studi lain justru menemukan dampak negatif akibat otomatisasi yang menggantikan tenaga kerja tidak terampil. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan adanya variabel yang belum banyak digali, yaitu peran kualitas pemerintah yang dapat mengubah arah dampak digitalisasi tersebut. Selain itu, kajian di kawasan ASEAN yang menggabungkan keenam dimensi WGI secara utuh masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian hanya menggunakan satu atau dua indikator saja. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mereduksi keenam dimensi WGI menjadi satu indeks kualitas pemerintah yang komprehensif, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kekuatan institusional di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang menggabungkan dimensi waktu (*time-series*) dan dimensi lintas negara (*cross-section*), sesuai dengan prinsip-prinsip ekonometrika modern dari Wooldridge (2013) dan Baltagi (2013). Pemilihan enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, keenam negara ini merupakan enam ekonomi terbesar di kawasan ASEAN. Berdasarkan data IMF (2023) pada Tabel 1.2, secara kolektif keenam negara tersebut menyumbang 96,37% dari total PDB kawasan ASEAN senilai US\$3,79 triliun, sehingga hasil penelitian ini akan merepresentasikan kondisi ekonomi Asia Tenggara secara keseluruhan. Kedua, ketersediaan data yang lengkap dan konsisten selama periode penelitian 2004–2023 berbeda dengan empat anggota ASEAN lainnya, yaitu Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kamboja yang memiliki keterbatasan data pada berbagai indikator kunci, termasuk indeks Gini dan WGI, sehingga tidak memungkinkan untuk diikutsertakan dalam analisis panel data yang valid.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dominasi ekonomi keenam negara tersebut, Tabel 1.2 berikut menyajikan rincian PDB nominal masing-masing negara ASEAN pada tahun 2023 beserta kontribusinya terhadap total PDB kawasan.

Tabel 1. 2 PDB Nominal Negara-Negara ASEAN Tahun 2023

No	Negara	PDB Nominal (Juta USD)	Pangsa Kawasan (%)
1	Indonesia	1.371.171	36,12
2	Thailand	514.836	13,56
3	Singapura	501.428	13,21
4	Filipina	437.146	11,52
5	Vietnam	433.702	11,43
6	Malaysia	399.705	10,53
7	Myanmar	64.505	1,70
8	Kamboja	43.304	1,14
9	Brunei Darussalam	15.126	0,40
10	Laos	14.943	0,39
	Total	3.795.866	100,00

Sumber: IMF, 2023

Penelitian ini berfokus pada enam negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Keenam negara tersebut dipilih sebagai representasi utama dalam penelitian karena memiliki peran ekonomi yang besar di kawasan ASEAN. Namun, cakupan enam negara ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh kondisi negara-negara ASEAN, melainkan merepresentasikan sebagian besar aktivitas ekonomi kawasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks negara-negara ASEAN yang menjadi cakupan penelitian, bukan sebagai gambaran keseluruhan sepuluh negara anggota ASEAN.

Rentang waktu penelitian 2004–2023 dipilih karena merepresentasikan transformasi ekonomi digital yang masif di Asia Tenggara. Periode ini mencakup

transisi dari adopsi awal teknologi informasi hingga kematangan ekosistem ekonomi digital yang ditandai dengan kemunculan berbagai perusahaan rintisan berskala *unicorn*. Transformasi struktural ini terbukti dengan pesatnya pertumbuhan nilai ekonomi digital kawasan yang mencapai angka GMV (*Gross Merchandise Value*) sebesar US\$300 miliar pada tahun 2023. Rentang waktu ini sangat ideal untuk menangkap dampak jangka panjang digitalisasi terhadap dinamika ketimpangan, karena cukup panjang untuk merekam efek akumulasi perubahan teknologi sekaligus cukup kontemporer untuk relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Berdasarkan seluruh paparan fenomena, data empiris, serta adanya kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, terdapat urgensi untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul "Pengaruh Digitalisasi dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Enam Negara ASEAN".

Dengan demikian, hubungan antara digitalisasi dan ketimpangan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas teknologi digital digunakan, tetapi juga oleh lingkungan kelembagaan tempat digitalisasi tersebut berkembang. Digitalisasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi, pasar, layanan keuangan, dan berbagai peluang ekonomi sehingga berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun, manfaat tersebut tidak selalu dapat dinikmati secara merata apabila kualitas tata kelola pemerintah belum mampu menciptakan kebijakan, regulasi, dan pelayanan publik yang mendukung inklusivitas. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintah menjadi faktor penting yang dapat menentukan seberapa besar manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, keterkaitan digitalisasi, kualitas tata kelola pemerintah, dan ketimpangan pendapatan menjadi penting untuk dikaji, karena pengaruh digitalisasi terhadap ketimpangan dapat berbeda bergantung pada kualitas tata kelola yang menyertainya.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik yang mendalam bagi studi ekonomi pembangunan, khususnya dalam memperkaya diskusi mengenai efektivitas kebijakan publik di era disrupsi digital, tetapi juga menjadi landasan kebijakan yang kuat bagi para pengambil keputusan

di Asia Tenggara. Temuan ini dapat memberikan dasar bagi pengambil kebijakan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus berjalan beriringan dengan reformasi institusi, tanpa perbaikan pada aspek akuntabilitas dan efektivitas birokrasi, digitalisasi hanya akan menjadi alat bagi segelintir elit, bukannya solusi bagi masyarakat luas.

Penelitian ini selaras dengan visi *UNDP Strategic Plan 2022–2025* serta komitmen pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada poin SDGs 9, yakni mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur digital yang inklusif, serta SDGs 10 yang menargetkan pengurangan kesenjangan pendapatan. Dengan mengintegrasikan kedua tujuan tersebut, penelitian ini berupaya membedah mekanisme transformasi digital yang manusiawi, di mana kemajuan teknologi tidak hanya memacu efisiensi industri, tetapi juga memastikan inklusivitas ekonomi agar tidak ada seorang pun yang tertinggal (*leaving no one behind*) dalam proses pembangunan di Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap ketimpangan pendapatan di enam negara ASEAN periode 2004-2023?
2. Bagaimana pengaruh kualitas tata kelola pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di enam negara ASEAN periode 2004-2023?
3. Apakah pengaruh digitalisasi terhadap ketimpangan pendapatan bergantung pada kualitas tata kelola pemerintah di enam negara ASEAN periode 2004-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap ketimpangan pendapatan di enam negara ASEAN periode 2004-2023

2. Menganalisis pengaruh kualitas tata kelola pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di enam negara ASEAN periode 2004-2023.
3. Untuk menganalisis apakah pengaruh digitalisasi terhadap ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintah di enam negara ASEAN periode 2004–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

Manfaat Teoritis (Akademis):

- a. Pengembangan Literasi Ekonomi Pembangunan: Memberikan kontribusi bagi literasi ekonomi terkait pengaruh teknologi terhadap distribusi pendapatan, khususnya dalam membuktikan teori *Skill-Biased Technological Change* (SBTC) di kawasan ASEAN.
- b. Penguatan Teori Institusionalisme: Memperkuat argumen teoritis bahwa kemajuan teknologi sangat bergantung pada kualitas institusi (*governance*).
- c. Referensi Metodologis: Menjadi referensi penelitian bagi akademisi lain dalam penggunaan metode *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengolah indeks kualitas tata kelola pemerintah dan indeks digitalisasi

Manfaat Praktis (Kebijakan):

- a. Bagi Pemerintah Negara ASEAN: Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan transformasi digital yang inklusif, sehingga pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik tetapi juga pada penguatan birokrasi dan supremasi hukum.
- b. Pencapaian Target SDGs: Memberikan masukan strategis bagi pengambil kebijakan di kawasan Asia Tenggara dalam upaya mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 10 (Mengurangi Ketimpangan) dan nomor 16 (Institusi yang Tangguh).